

**IMPLEMENTASI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BADAN  
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh :**

**EXTALDO  
1910012111093**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg:02/Skripsi/HTN/FH/VIII-2023**

Nama : **EXTALDO**  
NPM : **1910012111093**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Implementasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Pembimbing,**



**Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H**

**IMPLEMENTASI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**Extaldo<sup>1</sup>, Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

Email : [extaldoganteng@gmail.com](mailto:extaldoganteng@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Implementation of Government Regulation (PP Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants (PNS). In practice, problems are still found related to the Procurement of Civil Servants at the Office of the Civil Service and Human Resources Development Agency (BKPSDM) of South Solok Regency Formulation of the problem 1) How is the Implementation of Procurement of Employees State Civil Service based on Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants by the South Solok District BKPSDM? 2) What are the obstacles faced in implementing the Procurement of Civil Servants based on Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants by BKPSDM of Solok Selatan Regency? 3) What are the efforts made in implementing the Procurement of Civil Servants based on Government Regulation Number 11 of 2017 concerning the Management of Civil Servants by BKPSDM of South Solok Regency? Types of sociological juridical research. Data sources used primary and secondary data, data collection techniques using document studies and interviews were analyzed qualitatively. Research results; 1) BKPSDM Solok Selatan Regency has implemented it according to the provisions of PP Number 11 of 2017 concerning the Management of Civil Servants. 2) Obstacles faced were participants who were infected with the Covid-19 virus and caused these participants to be unable to attend the CPNS exam. 3) Efforts made to coordinate with the BKN provide rescheduling for Covid-19 participants*

**Keywords: Implementation, Staffing and Development Agency Office, Human Resources, Procurement**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah adalah penyelenggaraan PNS untuk menghasilkan PNS yang profesional, berintikan nilai-nilai, etika profesi, bebas dari campur tangan politik, bebas dari korupsi, konspirasi dan nepotisme.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, manajemen PNS meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. pengadaan;
- c. pangkat dan Jabatan;
- d. pengembangan karier;
- e. pola karier;
- f. promosi;
- g. mutasi;
- h. penilaian kinerja;
- i. penggajian dan tunjangan;
- j. penghargaan;

k. disiplin;

l. pemberhentian;

m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan

n. perlindungan.

Landasan pengadaan Pegawai Negeri Sipil ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik No. 11 tahun 2002, pengadaan layanan publik dilakukan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 1, yaitu pengadaan layanan publik bertujuan untuk mengisi posisi yang kosong.

Pada pengadaan tahun 2021, pengadaan secara konvensional dilakukan dengan menggunakan lembar jawaban komputer (LJK). Proses pengadaan secara konvensional masih memiliki beberapa kendala, terutama dalam perekrutan calon PNS. Realita di lapangan masih terdapat permasalahan yaitu pada operasional pengadaan terdapat kendala dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) karena situasi di Indonesia terhalang oleh virus Covid-19 menghambat semua operasional.

Berdasarkan latar belakang, penulis melakukan penelitian dengan judul :

**“IMPLEMENTASI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SOLOK SELATAN”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Implementasi Pengadaan PNS berdasarkan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS oleh BKPSDM Kabupaten Solok Selatan?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang di hadapi dalam Mengimplementasi Pengadaan PNS berdasarkan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS oleh BKPSDM Kabupaten Solok Selatan?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan dalam Mengimplementasikan Pengadaan PNS berdasarkan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS oleh BKPSDM Kabupaten Solok Selatan?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisa Implementasi Pengadaan PNS berdasarkan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS oleh BKPSDM Kabupaten Solok Selatan
2. Untuk Menganalisa kendala-kendala yang di hadapi dalam Mengimplementasi Pengadaan PNS berdasarkan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS oleh BKPSDM Kabupaten Solok Selatan
3. Untuk Menganalisa upaya-upaya yang dilakukan dalam Mengimplementasikan Pengadaan PNS berdasarkan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS oleh BKPSDM Kabupaten Solok Selatan

**II. METODE PENELITIAN**

**A. Jenis Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*sociolegal research*). Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer ini diperoleh dari hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca keperpustakaan atau mempelajari data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada buku-buku yang terkait, artikel dan jurnal yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Analis SDM Aparatur Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan ibu Diniyyatur Rahmi.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan bahan dan data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode analisa kualitatif yaitu analisis yang dilakukan di mana data yang sudah diperoleh kemudian diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun sedemikian rupa.

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Implementasi Pengadaan PNS berdasarkan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS oleh BKPSDM Kabupaten Solok Selatan**

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Diniyyatur Rahmi JF Analis SDM Aparatur Muda BKPSDM Kabupaten Solok Selatan telah melakukan implementasi pengadaan

CPNS tahun 2021 dan telah berjalan sesuai dengan ketentuan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Kegiatan pelaksanaan pengadaan CPNS tahun 2021 terganggu oleh bencana nasional non alam Covid-19, sehingga beberapa ketentuan pelaksanaannya diganti seperti, petugas dan peserta diwajibkan menggunakan masker, menjaga jarak, mengukur suhu tubuh, pengurangan jumlah peserta dalam ruangan ujian, dan membawa hasil tes swab antigen yang dilakukan sebelum ujian berlangsung.

#### **B. Kendala-kendala yang di hadapi dalam Mengimplementasi Pengadaan PNS berdasarkan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS oleh BKPSDM Kabupaten Solok Selatan**

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Diniyyatur Rahmi JF Analis SDM Aparatur Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan. Pada prakteknya pelaksanaan pengadaan masih banyak kendala-kendala yang ditemui yakni:

1. Pada pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil adanya peserta yang terinfeksi virus Covid-19.
2. Terdapat 2 orang peserta calon pegawai negeri sipil terinfeksi Covid-19 tidak dapat menghadiri ujian CPNS.
3. Pada saat ujian akan dimulai tiba-tiba *server down* dari pusat

#### **C. Upaya-upaya yang dilakukan dalam Mengimplementasikan Pengadaan PNS berdasarkan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS oleh BKPSDM Kabupaten Solok Selatan**

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Diniyyatur Rahmi JF Analis SDM Aparatur Muda, BKPSDM Kabupaten Solok Selatan melakukan upaya-upaya agar kegiatan pengadaan berjalan dengan lancar, seperti:

1. Sebelum mengikuti ujian diharapkan peserta untuk melakukan swab antigen pada pos kesehatan yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara ujian.

2. Kantor BKPSDM Kabupaten Solok Selatan telah melakukan koordinasi dengan pihak BKN sehingga peserta yang terdampak Covid-19 segera memberikan laporan kepada panitia melalui *whatsapp* atau *Website* dan disertakan dengan bukti dari rumah sakit atau labor yg menyatakan peserta tersebut terinfeksi Covid-19. Pihak BKN memberikan penjadwalan ulang bagi peserta covid 19 untuk bisa mengikuti ujian kembali yang akan disampaikan secara langsung melalui ID peserta disitus SSCASN.BKN. Pada saat ujian susulan peserta diwajibkan membawa surat keterangan negatif covid-19.
3. Seluruh panitia dan peserta menunggu kurang lebih 2 jam diruang tunggu untuk bisa melakukan ujian kembali.

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. SIMPULAN**

1. Kegiatan Pengadaan CASN tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh BKN dan terselenggara dengan aman tanpa ada sanggahan yang menyalahi aturan. Kegiatan ini dilaksanakan telah dengan izin dari Satgas Covid-19 pada daerah masing-masing dan dilapangan dilaksanakan telah mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan peraturan BKN.
2. Kendala –kendala yang ditemukan antara lain:
  - a. Pengadaan CPNS tahun 2021 kurang efektif karena terdampak bencana nasional non alam wabah pandemi Covid-19. Menyebabkan ada beberapa peserta CPNS terinfeksi Covid-19.
  - b. Peserta calon pegawai negeri sipil tidak dapat mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditentukan.
  - c. Terjadinya *server down* mengakibatkan ujian tertunda selama kurang lebih 2 jam
3. Upaya yang dilakukan:

- a. Peserta yang terdampak Covid-19 segera memberikan laporan kepada panitia sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan.
- b. 2 orang peserta yang terdampak Covid-19 melakukan penjadwalan ulang oleh BKN.
- c. Seluruh peserta menunggu kurang lebih 2 jam diruang tunggu.

## B. SARAN

1. Agar Kepala Kantor BKPSDM Kabupaten Solok Selatan konsisten dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Agar Kepala Kantor BKPSDM Kabupaten Solok Selatan memberikan informasi kepada peserta untuk memenuhi protokol kesehatan covid-19
3. Agar pihak BKN memberikan penjadwal ulang bagi peserta yang terinfeksi Covid-19 untuk bisa mengikuti ujian kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Elly Fatimah, 2016, *“Manajemen Aparatur Sipil Negara” Modul Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kader PNS*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

Lexi J Moleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya

### B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

### C. Sumber lainnya

Nur Amrizal, 2018, *“Pengembangan Desain Kurikulum Pelatihan Teknis Nonklasikal Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan”*, Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., Dosen Pembimbing dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, atas bimbingan dan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan FH, Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H
3. Dosen Pembimbing Akademik, Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.
4. Ibu Diniyyatur Rahmi, S.Kom P JF Analis SDM Aparatur Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan
5. Jihan Vanesha Jaidi, S.H., yang telah memberikan semangat, waktu dan dorongan untuk terus berusaha dan belajar agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini